



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MATARAM
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EFFENDI EKO SASWITO
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 53248

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.665.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 1.335.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 615 m2/150 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.070.000.000		
3. Tanah Seluas 6.219 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000		
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
5. Tanah Seluas 574 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
6. Tanah Seluas 1.519 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	282.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	124.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.771.707.997



F. HARTA LAINNYA	Rp.	361.000.000
Sub Total	Rp.	6.203.707.997
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.203.707.997

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.